Siaran Pers

Janji Manis di Antalya, Hashim Tinggalkan Rakyat dan Memperparah Krisis Iklim



Jakarta, 13 November 2026 - Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) menilai pidato Indonesia di COP-31 mengabaikan kepentingan rakyat dari agenda iklim nasional. ARUKI telah menyerukan 5 (lima) hal mendesak kepada Pemerintah dan Delegasi Resmi Republik Indonesia: pelibatan secara bermakna rakyat di dalam agenda dan aksi iklim, hentikan deforestasi dan karhutla, penetapan segera peta jalan keluar dari industri fosil, pendanaan iklim yang berkeadilan serta menolak solusi sesat iklim.

Dalam pidatonya di panggung global konferensi perubahan iklim PBB ke-31 alias COP-31, Antalya *High Level Segment*, 12 November 2026, Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyinggung banyak isu: mulai dari kebakaran hutan dan lahan, pangan dan energi, target emisi nol bersih, hingga pendanaan iklim. Tapi penyebutan ini tak membuat pidato Hashim menjadi komprehensif.

Dalam durasi 6 menit berbicara, Hashim yang notabene menyampaikan “pesan iklim” di segmen pejabat tinggi negara, justru absen menyebut masyarakat sebagai bagian dari upaya kolaboratif menghadapi perubahan iklim. Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) menegaskan hal ini jelas tak memenuhi prinsip-prinsip keadilan iklim. Apalagi, kelompok rentan yang paling terdampak dari perubahan iklim justru lenyap dari isi pidato yang disampaikan.

“Sangat disayangkan, ketika membicarakan masa depan iklim Indonesia, subjek rentan yang paling terdampak justru disingkirkan dari pengambilan keputusan. Mereka hanya diposisikan sebagai korban, penjaga hutan, atau sukarelawan pemadam kebakaran,

bukan sebagai subjek yang memiliki pengetahuan dan kuasa untuk menentukan kebijakan iklim. Keadilan iklim harus membongkar ketimpangan kuasa untuk bisa menentukan masa depan komunitasnya, menjamin adanya keadilan antar generasi, termasuk beban kerja perawatan perempuan yang semakin besar." ujar **Armayanti Sanusi, Sekretariat ARUKI dan BEN Solidaritas Perempuan.**

Karhutla dan Deforestasi di Balik Klaim Pidato

Alih-alih menyampaikan komitmen negara untuk mencegah karhutla berulang dan semakin masif, Hashim lebih memilih pamer angka puluhan ribu relawan yang turut mengatasi karhutla. Hal ini justru semakin menunjukkan kegagalan negara dalam mengatasi karhutla, belum lagi El Niño masih disebut-sebut sebagai biang kerok atas tragedi yang sebenarnya disengaja ini.

"Hashim masih menyalahkan El Niño atas terjadinya karhutla, namun ia mengabaikan kegagalan pencegahan dan penanganan yang membuat kebakaran terjadi semasif ini. Kebakaran akibat El Niño yang terjadi berulang kali sudah diprediksi BNPB sejak Maret 2026. Namun pemerintah bersikap pasif, mengabaikan peringatan ilmiah, dan bahkan memangkas anggaran mitigasi bencana pada 2025 dan 2026. Capaian perhutanan sosial yang dibanggakan Hashim pun menjadi sia-sia karena karhutla dibiarkan terjadi hingga merusak kehidupan jutaan warga akibat udara beracun dan melepaskan jutaan ton karbon ke atmosfer," tutur **Yuyun Indradi**, **Direktur Eksekutif Trend Asia.**

Pernyataan Hashim bahwa pemerintah tidak akan memperluas pertanian ke kawasan hutan, khususnya hutan primer, juga bertentangan dengan kebijakan yang masih mendorong deforestasi. Di Papua Selatan, Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 591 Tahun 2025 telah mengubah peruntukan 486.939 hektare kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), termasuk 265.208 hektare hutan alam. Hingga saat ini, SK tersebut belum dicabut, sementara pembukaan hutan alam akibat Proyek Strategis nasional/PSN Merauke telah mencapai sekitar 40 ribu hektare hingga awal Juli 2026.

"Ketahanan pangan tidak boleh dibangun dengan menghancurkan hutan dan menghilangkan sumber penghidupan masyarakat. Komitmen Indonesia di COP31 tidak boleh menjadi retorika diplomasi iklim yang bertolak belakang dengan kebijakan pembangunan di dalam negeri. Pemerintah harus membuktikan pernyataannya dengan mencabut Kepmenhut 591 Tahun 2025, menghentikan deforestasi, pemulihan ekosistem, serta pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat dan komunitas lokal," ujar **Boy Jerry Even Sembiring**, **Direktur Eksekutif Nasional WALHI.**

Ketangguhan untuk Siapa?

Yayasan PIKUL juga mengingatkan bahwa komitmen membangun ketangguhan nasional tidak boleh berhenti pada ambisi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sektoral. Pidato pemerintah menyebut ketahanan pangan, air, kesehatan, dan pesisir, tetapi belum menjawab pertanyaan mendasar: siapa yang menentukan prioritas

adaptasi, siapa yang memperoleh manfaat pembiayaan, dan siapa yang menanggung risiko pembangunan?

“Adaptasi harus menjamin perlindungan hak dan ruang hidup masyarakat paling rentan, memperkuat kepemimpinan komunitas, serta didukung pembiayaan publik yang memadai dan dapat diakses langsung oleh masyarakat. Jangan sampai atas nama ketahanan dan pembangunan, masyarakat justru dipaksa menanggung risiko perubahan iklim dan konsekuensi dari pilihan pembangunan yang tidak mereka tentukan,” tutur **Direktur Eksekutif Yayasan PIKUL, Torry Kuswardono.**

Ambisi Pertumbuhan yang Abai Komitmen Stop Fosil

Dalam konteks ketahanan energi misalnya, Hashim mengelu-elukan soal pembangunan PLTS 100 Gigawatt. Pada peluncuran program ini pada Agustus 2026, presiden juga menyebut Program PLTS 100 Gigawatt akan mencakup dieselisasi, elektrifikasi perdesaan dan desa produktif, penguatan jaringan listrik, hingga penyediaan energi untuk kawasan industri. Namun penting digarisbawahi, ambisi ini harus dikawal dan dikunci dengan regulasi agar benar-benar terlaksana.

“Namun target itu tidak akan terwujud selama pemerintah masih melindungi batu bara dan gas. Transisi energi tanpa komitmen menghentikan energi fosil secara bertahap sama saja dengan mengabaikan akar krisis iklim. Dalam pidatonya, Hashim sama sekali tidak menyinggung energi fosil. Ini bukan kebetulan, Hashim sendiri mengaku 34 tahun berbisnis migas. Kita tidak bisa menggantungkan solusi krisis iklim pada orang yang punya kepentingan di industri penyebab krisis itu sendiri,” ujar **Sisilia Nurmala Dewi, Country Manager 350.org Indonesia.**

Dengan tanpa menyebut komitmen menghentikan energi fosil, Hashim mengatakan target Indonesia mencapai emisi nol bersih yakni pada 2060 atau lebih cepat. Lagi-lagi, komitmen ini belum memadai dan justru memperlihatkan kemunduran dari janji manis Presiden Prabowo sendiri. Dalam KTT G20 tahun 2024, Prabowo justru menyatakan bahwa Indonesia akan mencapai emisi nol bersih sebelum 2050.

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengatakan penetapan target yang lebih ambisius dan percepatan pengurangan emisi menjadi semakin mendesak mengingat waktu untuk membatasi kenaikan suhu global semakin terbatas. Dilansir dari laporan Climate Action Tracker, aksi iklim di Indonesia masih tergolong sangat tidak memadai.

“Ketergantungan terhadap energi fosil juga masih dipertahankan melalui kerangka regulasi dan kebijakan fiskal. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik masih membuka ruang bagi pengembangan PLTU untuk kebutuhan sendiri (captive power plant). Selain itu, pemerintah masih mengalokasikan subsidi dan dukungan fiskal yang besar bagi energi fosil. Berbagai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan fossil lock in dan menunjukkan bahwa komitmen transisi energi belum sepenuhnya diterjemahkan

ke dalam langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil," ungkap **Direktur Eksekutif ICEL, Lasma Natalia H. Panjaitan.**

Hasyim memang tidak layak jadi utusan khusus iklim Indonesia. Menurut Center of Economic and Law Studies (CELIOS), pendekatan Hasyim menyimpan risiko Indonesia masih mendorong investasi CCS/CCUS tanpa ada pemensiunan PLTU batubara. Risiko CCS/CCUS adalah kebocoran emisi, biaya investasi pembangkit semakin mahal dibanding langsung ke pembangkit energi terbarukan, dan kerugian lingkungan justru membesar karena ketergantungan batubara.

"Di Antalya, Hashim terang-terangan menyatakan bahwa aksi iklim harus berjalan seiring pembangunan ekonomi. Kalimat itu terdengar meyakinkan dari podium COP31, tapi ceritanya lain kalau dilihat dari kampung-kampung di sekitar smelter nikel di Sulawesi dan Maluku Utara. Pertumbuhan 8% yang dikejar Prabowo masih bertumpu pada sektor ekstraktif, dan yang pertama merasakannya adalah petani dan nelayan yang kehilangan hasil panen dan tangkapan. Kerugian mereka mencapai Rp3,64 triliun dalam 15 tahun, sementara manfaat ekonomi hilirisasi sendiri menyusut drastis setelah tahun kedelapan. Hal serupa dialami warga yang tinggal di dekat PLTU batu bara. Dari 20 PLTU paling berbahaya di Indonesia berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi sebesar USD109 miliar atau sekitar Rp1,8 kuadriliun sampai 2050, disertai 156 ribu kematian dini," ujar ***Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira A.***

Pendanaan Iklim dan Generasi Masa Depan yang Dilupakan

Hashim menawarkan pasar karbon dan pendanaan konservasi sebagai solusi iklim. Namun, skema karbon biru berisiko menjadikan laut sebagai aset negara dan korporasi, memprivatisasi ekosistem pesisir, membatasi wilayah tangkap, serta menyingkirkan masyarakat dari ruang hidupnya tanpa persetujuan. **Sekretaris Jenderal KIARA, Fikerman Saragih,** menyebut ini sebagai "perampasan laut yang dibungkus diplomasi iklim. Tanpa pengakuan dan perlindungan hak tenurial masyarakat pesisir, janji karbon biru di COP31 justru berpotensi memperpanjang konflik pesisir".

Dalam pidatonya di COP31, Hasyim menekankan pentingnya tanggung jawab negara maju untuk memenuhi komitmen pendanaan iklim sebesar 300 miliar dolar AS per tahun dan merealisasikan Baku-to-Belém Roadmap menuju 1,3 triliun dolar AS per tahun pada 2035. Namun, kedaulatan bukan hanya soal keberanian menuntut negara maju, tetapi juga keberanian mengendalikan aliran modal agar investasi tidak mengorbankan rakyat dan lingkungan.

"Indonesia tidak cukup hanya menuntut tanggung jawab negara maju. Pemerintah juga harus berani mengatur pembiayaan domestik dan internasional melalui transparansi, uji tuntas lingkungan dan HAM, serta akuntabilitas lembaga keuangan yang mengikat. Jangan sampai kita terus menuntut pendanaan untuk mengatasi krisis iklim, tapi disaat yang sama justru terus membiarkan aliran uang yang memperparah krisis tersebut. Kedaulatan iklim harus dibuktikan juga melalui keberanian menjalankan ekosistem keuangan berkelanjutan," tutur **Direktur Eksekutif TuK INDONESIA, Linda Rosalina.**

Pernyataan Hasyim mengenai komitmen Indonesia untuk tidak memilih antara "*development and climate action"* juga perlu diuji melalui arah kebijakan iklim dan skema pembangunan ekonomi yang dijalankan pemerintahan rezim Prabowo saat ini, termasuk jika mencermati agenda pavilion Indonesia di COP 31 yang semakin menonjolkan perdagangan karbon. Bagi Aksi! for gender, social and ecological justice, pembangunan ekonomi dan aksi iklim tidak dapat dikatakan berjalan bersamaan apabila pencapaian target ekonomi dan iklim justru dibayar dengan hilangnya hak masyarakat dan kelompok rentan, perampasan ruang hidup, dan meningkatkan kerusakan lingkungan, dan menciptakan beban utang baru.

"Persoalan pendanaan iklim bukan semata-mata tentang seberapa besar jumlah dana yang dituntut, tetapi dari mana sumber pendanaan berasal, bagaimana mekanisme penyalurannya, siapa yang mengelola, dan siapa yang menerima manfaat. Pendanaan iklim seharusnya bersumber dari pendanaan publik, bersifat terukur, dapat diprediksi, dan berbentuk grant-based finance sebagai tanggung jawab dan kewajiban mengikat negara industri sesuai Pasal 9.1 Perjanjian Paris. Lebih dari itu, mekanisme pendanaan harus menjamin keadilan sosial, perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap HAM, perlindungan perempuan dan kelompok rentan, serta akses pendanaan yang adil dan langsung bagi masyarakat dan kelompok yang terdampak krisis iklim," ungkap **Risma Umar, Wakil Direktur Aksi! for gender social and ecological justice.**

Ginanjar Ariyasuta sebagai Koordinator Climate Rangers Indonesia menyoroti absennya generasi muda dan anak-anak dalam pesan iklim Hashim, padahal hal ini tak kalah krusial ketika membicarakan masa depan iklim. "Kita terus menuntut tanggung jawab negara maju kepada negara berkembang, tetapi lupa akan tanggung jawab generasi hari ini kepada generasi berikutnya. Dibalik janji yang dipoles tersebut, nyatanya pembangunan PLTU batu bara masih terus berjalan. Jangan sampai pembangunan hari ini justru mewariskan krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang harus ditanggung generasi muda dan yang akan datang," ujar dia.

Bagi ARUKI, krisis iklim tidak akan bisa diselesaikan ketika Hashim hanya menyebutkan janji pertumbuhan ekonomi, perdagangan karbon maupun proyek-proyek hijau yang tetap mempertahankan pola eksploitasi alam. Keadilan iklim menuntut perubahan mendasar dalam arah pembangunan, yakni menghentikan ekspansi industri ekstraktif, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, menjamin pemulihan ekosistem, serta mengakui dan melindungi rakyat, termasuk subjek rentan. Rakyat bukan pihak yang harus dibuat tangguh menghadapi krisis seperti klaim pemerintah, melainkan pemegang kuasa dan hak yang harus dilibatkan secara bermakna dalam menentukan masa depan iklim dan komunitasnya.

Tentang ARUKI

Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) adalah blok politik nasional yang melibatkan lebih dari puluhan organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Didirikan pada November 2023, ARUKI tumbuh dari keprihatinan bersama terhadap ancaman krisis iklim dan ketidakadilan yang ditimbulkannya, terutama bagi kelompok-kelompok yang paling rentan. ARUKI hadir untuk mendorong perubahan sistemik menuju terwujudnya

keadilan iklim di Indonesia. Dalam perjuangannya, ARUKI menempatkan keadilan sosial, pemenuhan hak-hak dasar, dan penguatan solidaritas antar jaringan sebagai landasan utama untuk mencapai keadilan iklim yang berpihak pada masyarakat.

Kontak/Narahubung:
Mareta (+62 813-8501-8526)

Aliansi ARUKI terdiri dari:

1. 350.org Indonesia
2. AKSI! For Gender, Social and Ecological Justice
3. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
4. CELIOS
5. Climate Ranger (CR) Jakarta
6. DPP Kasbi
7. Eknas WALHI
8. ELS FH UI
9. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)
10. HUMA
11. ICEL
12. Kemitraan
13. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)
14. Koaksi Indonesia
15. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
16. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)
17. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
18. Koprol Iklim
19. Madani Berkelanjutan
20. Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS)
21. Pantau Gambut
22. Solidaritas Perempuan
23. Sawit Watch
24. Trend Asia
25. TuK Indonesia
26. WALHI Jakarta
27. XR Indonesia
28. Yappika
29. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
30. Yayasan PIKUL
31. Yayasan Pusaka
32. Koalisi Perempuan Indonesia
33. RMI
34. Mama Aleta Fund
35. Greenpeace Indonesia
36. JAMTANI
37. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)
38. Lembaga Hikmah dan Kebijakan PP Muhammadiyah
39. PUSPAHAM
40. Indonesia Parliamentary Center (IPC)
41. CommsLab
42. Women Research Institute
43. CARE
44. Kalyanamitra